

Narrative Report of Workshop
“The Future of Economic Development in Post Conflict and Post Tsunami in Aceh”
Saree, 26 – 29 November 2007

1. LATAR BELAKANG

Masa rekonstruksi dan pemulihan telah berlangsung selama lebih kurang 3 tahun paska bencana tsunami dan konflik di Aceh. Beberapa donor dari dalam dan luar negeri telah terlibat aktif dalam proses tersebut. Pemulihan yang dilakukan pada berbagai sektor telah sangat membantu masyarakat Aceh untuk bangkit dan memulai kehidupan baru paska bencana dan konflik. Setelah 3 tahun berlangsungnya proses rekonstruksi dan pemulihan Aceh, tapi masih tersisa beberapa permasalahan kecil yang berpotensi untuk berkembang menjadi lebih besar.

Meskipun dana yang masuk ke Aceh pasca tsunami dan MoU Helsinki telah mencapai 8-9 miliar dolar AS atau setara dengan Rp 73,20 triliun – Rp. 82,35 triliun, tetapi sebahagian besar masyarakat Aceh masih hidup dibawah garis kemiskinan. Hal ini terjadi dikarenakan sebahagian besar dana tersebut digunakan untuk pembangunan fisik. Sementara pembangunan ekonomi terkesan kurang mendapat perhatian atau hanya menyerap dana lebih kecil dari sektor pembangunan fisik.

Hasil survey selama 3 hari dengan 2 tim di 2 area penelitian, menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang masih berada dibawah garis kemiskinan walaupun sebahagian dari mereka merupakan penerima manfaat dari bantuan untuk proses rekonstruksi dan pemulihan Aceh. Dengan berdasarkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat Aceh secara umum, masih banyak kesempatan yang dimiliki oleh baik itu pemerintah kabupaten, pemerintah propinsi, pemerintah pusat maupun non lembaga pemerintahan untuk pengembangan ekonomi Aceh yang lebih baik.

Semua unsur masyarakat haruslah terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam pembangunan Aceh. Aceh Society Development (ASD) sebuah lembaga non pemerintahan lokal yang bergerak pada pemberdayaan ekonomi masyarakat Aceh, dengan dukungan sepenuhnya dari The World Bank telah melaksanakan sebuah workshop dengan tema “*The Future of Economic Development in Post Conflict and Post Tsunami in Aceh*”. Workshop ini merupakan sebuah wadah yang telah menampung segala bentuk pemikiran-pemikiran yang berhubungan langsung dengan pembangunan ekonomi Aceh, yang berasal dari seluruh elemen masyarakat seperti ulama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, KPA, pemerintah propinsi dan kabupaten, NGO, donor internasional dan akedemisi.

Ada beberapa tujuan yang telah menjadi prioritas dalam pelaksanaan workshop, yaitu:

- a. Mengidentifikasi pemikiran-pemikiran maju tentang cara yang terbaik untuk pengembangan sebuah konsep ekonomi yang berkesinambungan dan bagaimana cara pelaksanaannya oleh pelaku-pelaku utama di Aceh.
- b. Meningkatkan kesadaran akan kepentingan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Aceh antara para pemegang saham dan stakeholder.
- c. Merancang strategi-strategi praktis untuk pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan praktek-praktek yang terbaik dari pelaku-pelaku utama yang telah berhasil di Aceh.

- d. Rencana strategis pertumbuhan ekonomi yang bertujuan untuk peningkatan kapasitas dan mata pencaharian serta proses perdamaian yang berkelanjutan.
- e. Memberikan rekomendasi-rekomendasi untuk pemerintah daerah, BRR, BRA, donor dan NGO mengenai pertumbuhan ekonomi berdasarkan prioritas.

2. OVERVIEW

Workshop tersebut berlangsung selama 3 hari dari tanggal 26 – 29 November 2007, yang bertempat di gedung BLPP Saree Kabupaten Aceh Besar. Jumlah peserta yang hadir sebanyak 108 peserta dari 128 peserta yang diundang.

Ada 3 kegiatan penting yang dilaksanakan pada workshop yaitu;

- Pemaparan makalah yang dilakukan oleh pemateri terpilih
Pemilihan pemateri dilakukan berdasarkan pada keahlian dan terapan ilmu yang dimiliki oleh pemateri yang disesuaikan dengan judul makalah yang terpilih.
- Fokus group diskusi
FGD dilaksanakan dalam 6 (enam) kelompok dengan berdasarkan judul FGD yang telah dipersiapkan.
- Perumusan hasil keseluruhan oleh tim perumus
Tim melakukan perumusan hasil dari session pertama dan kedua, yang nantinya menjadi rekomendasi-rekomendasi.

Selama pelaksanaan workshop telah ditemukan beberapa permasalahan yang menjadi hambatan dalam berkembangnya ekonomi Aceh yang lebih baik, hal tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

- Kondisi sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perdagangan sekarang berada pada masa kritis. Dimana, situasi pada masa konflik yang telah menghancurkan mata pencaharian masyarakat. Kebutuhan modal yang mendesak oleh masyarakat Aceh untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan mengembalikan mata pencaharian.
- Ketergantungan yang besar masyarakat terhadap pupuk buatan, pestisida dan herbisida telah meningkatkan biaya produksi.
- Terdapat sedikit perbedaan kegiatan antara kelompok perempuan di daerah pesisir dengan kelompok perempuan di area pedalaman. Banyaknya bantuan yang diterima oleh kelompok perempuan di daerah pesisir telah menempatkan mereka pada kehidupan yang lebih baik.
- Tingginya angka keluarga rentan terutama kelompok perempuan sebagai kepala keluarga telah mengakibatkan meningkatnya angka kemiskinan.
- Tidak berkembangnya skill dan teknologi di berbagai sektor yang dimiliki oleh masyarakat Aceh sebagai pendukung dalam kegiatan-kegiatan ekonomi.
- Tidak adanya dana segar yang bisa diakses oleh kelompok rentan sebagai modal kerja.

- Kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang tidak berpihak langsung pada kelompok rentan.
- Tidak adanya informasi-informasi harga komoditas yang bisa diakses oleh petani secara langsung.
- Tidak adanya pabrik-pabrik pengolahan yang bisa menampung hasil produksi petani disaat terjadi over produksi.

Adanya tindak lanjut kegiatan dari ASD melalui beberapa implementasi program merupakan target selanjutnya dari workshop. Tantangan ini merupakan tanggung jawab kita semua umumnya dan ASD khususnya.

3. HIGHLIGHT PER SESSION

3.1. ACARA PEMBUKAAN (hari pertama)

3.1.1 Laporan Singkat Panitia oleh Drs. Mahadi Bahtera

Panitia telah mempersiapkan workshop ini selama sebulan penuh, dengan diiringi oleh beberapa pertemuan untuk perumusan langkah kerja. Dengan didukung oleh 20 orang staff yang telah bekerja tanpa lelah dalam menyukkseskan workshop ini. Peserta yang diundang untuk workshop ini berjumlah 120 peserta yang terdiri dari pihak pemerintah, akademisi, perbankan, koperasi, LSM nasional dan internasional serta tokoh masyarakat. Dan pekerjaan berat sebenarnya telah dimulai pada hari ini.

3.1.2 Perkenalan Aceh Society Development (ASD) oleh Nashiruddin Ahmad

ASD adalah sebuah LSM lokal yang lahir dengan didasari oleh kebutuhan, cikal bakal lahirnya ASD adalah bermula dari sebuah Pabrik Batu Bata (PBB) dan Koperasi Hareukat Rakyat. ASD akan mengambil peranan dalam pengembangan ekonomi di seluruh Aceh seperti yang telah dilakukan oleh Koperasi Hareukat Rakyat di sebuah kecamatan di Kabupaten Bireuen. Karena, kita semua tahu perdamaian yang sudah tercipta di Aceh akan mudah sirna jika kehidupan masyarakat masih berada dibawah garis kemiskinan. Selama masa konflik, banyak sarana dan pra sarana pendukung ekonomi masyarakat yang hancur, sehingga membutuhkan perbaikan untuk membangun kembali ekonomi masyarakat. Kami sangat peduli dengan kelanjutan proses perdamaian, karena tanpa kesejahteraan masyarakat maka perdamaian akan hanya ada dalam impian belaka.

3.1.3 Kata Sambutan dari The World Bank oleh T. Safriza Sofyan

3.1.4 Kata Sambutan dari Gubernur NAD oleh Darmawan, SE

Tujuan pokok pembangunan ekonomi adalah untuk membangun peralatan modal dalam skala yang cukup untuk meningkatkan produktivitas di bidang pertanian, pertambangan, perkebunan dan industri. Hakikat pembangunan ekonomi adalah penciptaan modal sosial dan ekonomi, pembentukan modal juga mempengaruhi kesejahteraan ekonomi Aceh. Kredit Peumakmue Naggroe yang digagas pemerintah

Aceh sudah berjalan namun masih banyak kendala yang ditemukan dilapangan maka perlu segera diperbaiki sistem penyaluran dan pengembalian oleh Bank Pembangunan Daerah. Pemberian kail "bukan ikan" sebagai strategi pemberdayaan ekonomi rakyat pun ternyata tidak memadai. Masyarakat miskin juga perlu diajari bagaimana cara memancing yang baik, bahkan ada persoalan mendasar bahwa masyarakat miskin yang diberdayakan itu juga perlu dijamin agar sungai yang dipancing tidak keruh dan sustainable.

3.2. Pemateri dan Diskusi

3.2.1 Pemberdayaan Ekonomi Pertanian Berbasis Masyarakat oleh Prof. Dr. Ir. Yuswar Yusuf, MP.

Terdapat beberapa ide penting yang dipaparkan oleh pemateri ataupun peserta, yaitu:

- Penyediaan lapangan pekerjaan kepada masyarakat Aceh yang akan menjadi perhatian utama dari pemerintah daerah dan lembaga-lembaga yang berkepentingan, seperti peningkatan skill dan menghubungkan dengan pekerjaan dan pasar.
- Peningkatan hasil produksi pertanian melalui pengenalan tehnologi terkini kepada masyarakat.
- Membentuk Badan Otoritas Pertanian Aceh, yang berperan sebagai pendistribusian informasi tehnologi dan informasi harga kepada petani.
- Mendukung sepenuhnya setiap kebijakan pemerintah Aceh, seperti pemberantasan Illegal Logging
- Mengaktifkan kembali freeport Sabang sebagai jalur perdagangan internasional

3.2.2 Penerapan Tehnologi Terapan Tentang Konservasi Berbasis Lingkungan oleh Ir. Khairullah, M.Sc.

Ide-ide penting yang dikemukakan oleh pemateri dan peserta adalah:

- Pemanfaatan limbah pertanian sebagai pakan ternak (jerami, batang kedelai, dedak dan kulit buah kakao).
- Memperkenalkan Crop Livestock System (CLS) kepada masyarakat.
- Pencetusan Provinsi Aceh sebagai provinsi organik melalui pengenalan pupuk, pestisida dan tehnik budidaya pertanian organik kepada masyarakat. Ini merupakan salah satu jalan keluar untuk mengantisipasi tingginya harga pupuk buatan, dan juga bermanfaat memperbaiki keadaan lingkungan hidup.

3.2.3 Akses Pasar Berbasis Jaringan Kerja oleh Prof. Dr. Jasman J. Ma'ruf, MBA.

Ada beberapa isu yang signifikan yang peroleh dari peserta dan pemateri, yaitu:

- Usaha yang besar dimulai dari usaha yang kecil; setiap program kegiatan dari donor haruslah difokuskan pada usaha-usaha kecil dan menengah, yang nantinya akan menjadi besar dan kuat.
- Ada beberapa kunci sukses untuk usaha kecil; menarik, respon terhadap keadaan sekeliling, rajin, ekonomis, respon terhadap situasi pasar dan peningkatan kapasitas terhadap staff.

3.2.4 Revitalisasi Koperasi Untuk Pemberdayaan Ekonomi oleh M. Hanafiah, SE. MM.

Beberapa ide penting yang diperoleh dari pemateri dan peserta adalah:

- Mengaktifkan kembali koperasi perempuan dan peningkatan kelompok perempuan untuk menjadi koperasi sebagai salah satu cara untuk menciptakan kemandirian dari masyarakat.
- Adanya studi perbandingan bagi koperasi lokal ke daerah lain yang bertujuan untuk memperkenalkan teknologi terbaru.
- Menciptakan prinsip inisiatif, kewirausahaan dan kemandirian dalam pengelolaan koperasi

3.2.5 Akses Finansial oleh Masyarakat Melalui Pemberdayaan dan Perkembangan Ekonomi oleh Muchtar Abbas

Ide-ide penting telah lahir dari presentasi pemateri dan diskusi peserta, yaitu:

- Adanya kemudahan bagi pelaku bisnis terutama masyarakat miskin dalam pengaksesan dana dari bank dan mikro finance
- Badan mikro finance harus mendukung setiap usaha bisnis dari masyarakat terutama kelompok-kelompok rentan.
- Bank harus benar-benar fokus terhadap masyarakat miskin dalam penyaluran dana kredit dengan suku bunga yang kecil

3.3. Fokus Grup Diskusi (hari kedua)

Peserta workshop telah dipisahkan kedalam 6 kelompok FGD, setiap peserta diberikan kebebasan dalam menentukan topik dan kelompok sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman mereka. Topik-topik yang terpilih telah ditentukan oleh panitia berdasarkan kebutuhan dan gambaran secara umum keadaan sosial ekonomi Aceh saat ini. Secara umum, setiap kelompok FGD terdiri dari 10 sampai dengan 18 peserta dan difasilitasi oleh 2 orang fasilitator serta 1 orang note taker. FGD telah berlangsung selama 10 jam, bahkan beberapa kelompok menghabiskan waktu selama 14 jam. Lamanya waktu yang dibutuhkan oleh kelompok FGD, menunjukkan bahwa proses diskusi dan keaktifan peserta sangat tinggi dalam pembahasan permasalahan. Hasil dari fokus grup diskusi dapat terlihat secara lengkap pada lampiran 1.

FGD Kelompok I

Topik: Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah

1. Latar Belakang Pemilihan Topik

Topik “Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah” dipilih setelah Tim WB dan ASD melakukan survey ke wilayah pantai Barat-Selatan dan Utara-Timur. Salah satu temuan yang menjadi alasan kuat diangkatnya topik ini adalah ketika tim mengunjungi Kabupaten Aceh Selatan. Dulunya komoditi pala merupakan komoditi unggulan kabupaten ini. Namun lebih dari satu dekade belakangan ini, luas areal perkebunan pala milik masyarakat menyusut akibat serangan penyakit yang belum berhasil teratasi. Beberapa warga yang ditemui memperkirakan lahan yang tersisa tinggal 20% saja. Penyusutan areal ini berimplikasi dengan menurunnya pendapatan masyarakat. Ketika penyakit belum menyerang perkebunan pala, masyarakat yang memiliki satu hektar

kebun pala mampu mendapat penghasilan Rp. 5 juta/bulan, tetapi kini dengan luas perkebunan yang sama, masyarakat hanya mampu meraih penghasilan Rp. 100 ribu-Rp. 500 ribu/bulan. Ironisnya, meskipun pemerintah memahami sekali bahwa Aceh Selatan merupakan penghasil pala dengan kualitas baik dan juga mengetahui persis jika sebagian masyarakatnya menggantungkan hidup dari tanaman ini, namun belum terlihat keinginan kuat pemerintah yang memihak kepada para petani pala. Paling tidak ini tercermin bagaimana cara pemerintah mengalokasikan dana dalam menangani kehancuran potensi ekonomi masyarakatnya.

2. Dinamika FGD

Kasus yang dihadapi sebagian masyarakat Aceh Selatan ini sangat mungkin terjadi di kabupaten-kabupaten lain di Aceh. Berangkat dari kasus ini pula, FGD Kelompok I mencoba menggali berbagai potensi ekonomi Aceh—baik secara sektoral maupun kabupaten/kota—di mana mayoritas pelakunya adalah masyarakat kelas menengah-bawah. Selain itu FGD ini mencoba mencari tahu permasalahan yang sedang dihadapi sekaligus mencari solusi terhadap permasalahan-permasalahan tersebut.

Sebagai tambahan, peserta FGD kelompok I berasal dari berbagai wilayah: Banda Aceh, Aceh Tenggara, Aceh Selatan, Aceh Utara, Bireun, dan Pidie Jaya. Begitu pula dengan latar belakang pekerjaan mereka, di antaranya: staf Dinas Perkebunan Aceh, Dinas Sumber Daya Alam, ulama, eks-kombatan, dan pelaku bisnis perikanan.

3. Sektor Potensi Ekonomi Aceh

Meskipun para peserta tidak semuanya memiliki latar belakang pengalaman dan pengetahuan yang sama dalam bidang perekonomian, tetapi berdasarkan pengamatan selama ini, mereka mencoba mengidentifikasi sektor-sektor serta komoditi yang menjadi potensi ekonomi Aceh disertai permasalahan yang sedang dihadapi saat ini.

Tabel 1. Sektor Potensi Ekonomi dan Permasalahannya

No.	Sektor Ekonomi	Produk/Komoditi	Masalah
1	Kelautan dan Perikanan	Ikan dan udang laut; Ikan dan udang tambak	<p>Perikanan tangkap: SDM nelayan rendah dalam hal penangkapan dan pengolahan; lemahnya pengawasan teritorial laut; penggunaan bahan peledak sebagai alat tangkap; tata niaga belum berpihak pada pelaku pasar; Tidak tersedianya infrastruktur seperti TPI di pantai Barat-Selatan.</p> <p>Perikanan budidaya: Terjadinya pendangkalan kuala; serangan Mobodon Bacolo Virus (MBV) yang menyerang tambak ikan dan udang masyarakat; keterbatasan peralatan perikanan tambak; terbatasnya fasilitas penangkaran benih ikan-ikan yang memiliki nilai ekonomi tinggi seperti: kerapu, bandeng, lele, dumbo, dan patin; harga pakan mahal; infrastruktur irigasi kurang; keterbatasan modal</p>
2	Pertanian	Padi, kacang tanah, melinjo, kedelai, pinang, buah-buahan (seperti pisang, jeruk, alpukat)	<p>Lemahnya SDM pelaku; Irigasi dan akses transportasi yang terbatas; kurangnya jumlah alat pengolahan tanah; minimnya subsidi pemerintah; penyuluh pertanian tidak berfungsi secara optimal; kurangnya alat olah tanah; bantuan yang tidak tepat sasaran; berkurangnya peran kelompok tani; kejeun blang tidak aktif</p>
3	Perkebunan	Pala, nilam, minyak nilam, sawit, cengkeh, kelapa, coklat, kopi, tembakau, minyak serai, kemiri, dan jagung	<p>SDM petani kebun rendah; alokasi anggaran pengembangan terbatas; infrastruktur kurang memadai seperti terbatasnya akses transportasi dan sarana pengairan yang tidak memadai; pengelolaan yang tidak fokus; Lahan HGU yang dilerantarkan pemilik izin HGU sehingga tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat; pabrik pengolahan komoditi yang masih kurang sehingga hasil panen perkebunan dijual dengan harga murah; pengawasan pembelian bibit yang lemah dari pemerintah mengakibatkan bibit yang sampai ke petani sering tidak berkualitas.</p>
4	Peternakan	Sapi	<p>SDM peternak rendah; pemerintah kurang peduli, hal ini bisa dilihat dari kurangnya penyuluhan/tenaga</p>

			pendamping, modal, dan bantuan ternak berkualitas rendah.
5	Perdagangan dan Industri (skala kecil)	Anyaman, makanan ringan (seperti keripik ubi, keripik pisang, sirup dan kue pala, ikan asin)	Perdagangan: Kurangnya modal;minimnya fasilitas; dan juga lemahnya dukungan dari pemerintah Industri:SDM pengrajin (seperti anyaman) terbatas; kualitas rendah; modal terbatas dan tidak adanya peran bapak angkat; promosi lemah.
6	Kehutanan	Damar, Jenang	Belum adanya industri pengolahan; pembinaan dan pelatihan masih kurang; jaringan pemasaran masih lemah; modal terbatas; infrastruktur kurang memadai; tidak ada penanaman kembali.

4. Kabupaten/Kota dan Potensi Ekonominya

Dengan bekal pengamatan dan informasi yang mereka miliki juga, para peserta kemudian diminta mengidentifikasi potensi-potensi ekonomi yang dimiliki setiap wilayah atau kabupaten/kota di Aceh.

Tabel 2. Kabupaten/Kota dan Potensi Ekonominya

No.	Kabupaten	Sektor					
		Kelautan & Perikanan	Pertanian	Perkebunan	Peternakan	Perdagangan & Industri (skala kecil)	Kehutanan
1	Sabang	Perikanan laut	Kedondong, salak	-	-	Industri kue penganan	-
2	Banda Aceh	Perikanan laut	-	-	-	Dendeng, penganan	-
3	Aceh Jaya	Perikanan laut		Sawit, karet			
4	Aceh Barat	Perikanan laut	Padi	Sawit, karet			
5	Nagan Raya		Padi	Sawit, karet			
6	Abdya	Perikanan laut	Kacang tanah, padi, jeruk	Sawit			
7	Aceh Selatan	Perikanan laut	Pala	Pala, nilam		Minyak nilam, sirup pala, kue pala.	

8	Singkil	Perikanan laut		Sawit			
9	Subulussalam			Sawit, karet			
10	Aceh Besar	Perikanan laut	Buah-buahan, padi	Cokelat	Sapi	Penganan kecil (seperti keripik)	
11	Pidie/Pidie Jaya	Perikanan laut	Padi dan palawija, pisang	Melinjo, cokelat	Sapi	Kerupuk melinjo, peci/kopiah.	
12	Bireun	Perikanan laut dan tambak	Kacang kedelai,	Kelapa, sawit,	Sapi	Penganan ringan	
13	Aceh Utara	Perikanan laut dan tambak	Padi	Sawit, kelapa, pinang, cokelat, karet			
14	Aceh Timur/Langsa	Perikanan laut dan tambak	Padi	Karet, sawit, pinang, kelapa			
15	Aceh Tamiang	Perikanan laut dan tambak	Padi	Karet, sawit, pinang, kelapa			
16	Bener Meriah		Sayur-sayuran, jeruk, alpukat (hortikultura)	Kopi	Sapi		
17	Aceh Tengah		Sayur-sayuran, jeruk, alpukat (hortikultura)	Kopi	Sapi		
18	Gayo Lues		Serai, buah-buahan		Kerbau, sapi	Anyaman tikar	
19	Aceh Tenggara	Perikanan tambak		Jagung, kemiri, sawit, karet, cokelat,		Kursi rotan, pandai besi	
20	Simeulue	Perikanan laut		Cengkeh, sawit, kelapa,			Rotan, damar

5. Solusi

Pada bagian akhir FGD, peserta membahas solusi permasalahan tersebut dan siapa aktor yang relevan untuk mengeksekusi solusi-solusi tersebut. Dari enam sektor yang diidentifikasi sebagai potensi ekonomi Aceh, beberapa diantaranya menghadapi permasalahan yang sama.¹

Tabel. 3 Masalah yang sering muncul

No.	Masalah	Solusi	Pelaku Solusi			Keterangan
			Gov	Donor and/or NGO	Swasta	
1	SDM pelaku lemah	Melakukan pelatihan, studi banding, dan mengintensifkan penyuluhan teknis kepada para pelaku	√	√	√	Sektor perikanan & kelautan, pertanian, perkebunan, peternakan, dan industri)
2	Modal terbatas untuk peningkatan kapasitas usaha	Menambah bantuan modal bagi para pelaku	√	√	√	Kelautan,
3	Infrastruktur pendukung masih kurang, akses transportasi ke lokasi kegiatan ekonomi masih terbatas.	Membangun infrastruktur dan akses transportasi yang memadai	√	√	√	Perikanan dan Kelautan (infrastruktur: TPI di wilayah Barat-Selatan Aceh, tempat penyimpanan ikan); Pertanian dan Perkebunan (akses transportasi)
4	Rendahnya kualitas bibit yang diberikan oleh Pemerintah	Penyediaan bibit berkualitas	√	√	√	Sektor pertanian, perkebunan

Selain itu, beberapa permasalahan yang diidentifikasi dari berbagai sektor tersebut, menurut peserta, dinilai cukup strategis untuk menggerakkan perekonomian masyarakat di level menengah-bawah dalam skala yang relatif besar. Tetapi tentu saja untuk menggerakkan masyarakat tersebut, permasalahannya harus terlebih dahulu diselesaikan. Beberapa permasalahan strategis tersebut adalah:

¹ Permasalahan dan solusi lengkap dari masing-masing sektor dapat dilihat pada: Lampiran Solusi FGD Kelompok I

a. HGU Non-Produktif

Salah satu permasalahan yang diangkat oleh para peserta adalah banyaknya jumlah lahan HGU yang tidak digarap oleh perusahaan yang sudah memiliki izin HGU tersebut. Meskipun persoalan yang diangkat oleh peserta hanya berdasarkan pengamatan atau informasi yang terbatas, namun jika dilihat dengan data yang dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan tahun 2006 lalu, luas lahan HGU yang tidak digarap memang relatif besar.

Tabel 4. Daftar Rekapitulasi HGU Perkebunan Besar di Aceh²

No.	Jumlah Perusahaan	Jumlah Kebun	Luas HGU (Ha)	Luas Tanaman	Luas Tanah Bangunan	Tanah Cadangan	Tanah yang tidak dapat digunakan	Keterangan
Tota l	109	123	342.197,20	199.512,62	10.923,67	110.275,23	17.720,66	Lada, kemiri, kakao, jahe, karet, sawit, kopi

Kalau melihat luas areal tanah cadangan, setidaknya 58,3% (199.512,62 ha) areal HGU belum dimanfaatkan oleh perusahaan pemilik HGU. Besarnya jumlah areal HGU yang belum digarap tentunya menutup peluang bagi masyarakat yang ingin membuka areal perkebunan rakyat. Sebagian peserta saat itu mengusulkan agar pemerintah mencabut izin HGU perusahaan yang tidak produktif. Namun, karena data yang tersedia saat ini belum dilakukan pembaruan (update), maka langkah awal yang dibutuhkan adalah memperbarui berapa besar HGU non-produktif yang berpotensi digarap oleh masyarakat sebagai perkebunan rakyat.

b. Prasarana Perekonomian

Konflik politik bersenjata dan bencana gempa yang disertai tsunami merupakan dua faktor yang menyebabkan kurang dan rendahnya kualitas infrastruktur atau prasarana publik. Bahkan menurut hasil Survei Desa Aceh 2006, prasarana yang mengalami tingkat kerusakan paling parah akibat konflik justru terjadi pada sektor perekonomian. Adapun prasarana-prasarana tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel. 5 Jenis Prasarana dengan Proporsi Tertinggi Kerusakan³

No	Prasarana	Proporsi Kerusakan Akibat Konflik (%)
----	-----------	---------------------------------------

² Dinas Perkebunan Provinsi NAD dalam *Agenda Pengembangan Ekonomi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Edisi Initial, Kerjasama Pemerintah Provinsi Aceh dan Republik Federal Jerman (dilaksanakan oleh GTZ), 8 Mei 2007.

³ *Survei Desa Aceh 2006: Evaluasi Keadaan Prasarana dan Sosial Desa*, PPK, PMD, dan Bank Dunia, 2007.

1	Tambak ikan atau udang	26,6
2	Generator	23,5
3	Lahan pertanian lain atau kebun	23,3
4	Jaringan listrik	21,7
5	Polindes	21,6
6	Tambatan perahu	21,0
7	Jalan kebun (tanah)	20,5
8	Jalan kebun (diperkeras)	20,4
9	Jembatan gelagar besi	20,1
10	Posyandu	20,1

Dari data di atas pula dapat diambil kesimpulan bahwa sektor pertanian dan perkebunan merupakan sektor yang memiliki tingkat kerusakan paling banyak. Setidaknya ini bisa dilihat dari tiga jenis prasarana yang berkaitan langsung dengan sektor ini yang mengalami kerusakan parah akibat konflik. Seperti salah satu rekomendasi prioritas para peserta FGD bahwa harus dilakukan perbaikan terhadap sarana dan prasarana sektor ini. Rekomendasi ini cukup beralasan karena sektor pertanian dan perkebunan merupakan sektor penyerap tenaga kerja terbesar di Aceh (35% dari 2, 4 juta angkatan kerja). Selain itu juga, sektor ini menyumbang 20,24%-21,04% terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Aceh dalam rentang tahun 2001-2005.⁴

⁴ Aceh Triple-A Project (ATAP): *Pengembangan Ekonomi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Kerjasama Pemerintah Provinsi Aceh dan Republik Federal Jerman (dilaksanakan oleh GTZ), 2007.

REPORT FGD KELOMPOK II

Pola Pemberdayaan kelompok rentan

1. Latar Belakang

Dipilihnya topik “Pola Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Rentan” dalam workshop ASD pada 27 November 2007 yang lalu merupakan hasil kesimpulan yang didapat dari assesment yang dilakukan oleh The World Bank dan ASD pada tanggal 7-10 November 2007 di Kabupaten Nagan Raya, Kab. Aceh Selatan, Bireuen, dan Aceh Timur.

Secara umum hasil assesment tersebut menyimpulkan beberapa hal diantaranya kurangnya akses modal, kurangnya informasi, tingginya angka pengangguran dikalangan mantan GAM, dan ketidakseriusan pemerintah daerah dalam pemberdayaan ekonomi rakyat.⁵ Dari berbagai kendala diatas, perhatian terhadap kelompok rentan juga sangat kurang, hal ini terlihat dari hasil assesment dari keempat kabupaten dimana hanya ada satu unit usaha yaitu pengasinan ikan di Aceh timur yang melibatkan perempuan, itupun bukan sebagai pemilik modal tetapi sebagai buruh.

Kelompok rentan di tengah masyarakat belum mendapatkan pemberdayaan/bantuan ekonomi secara adil, merata dan memadai, ini bisa saja terjadi karena memang belum ada mekanisme yang jelas dari pemerintah dan pihak lain yang selama ini membantu Aceh untuk melibatkan mereka. Berdasarkan kondisi diatas workshop ASD menentukan tema pemberdayaan ekonomi kelompok rentan sebagai salah satu topik yang akan di bicarakan dalam fokus group diskusi ini dengan harapan akan dapat memahami kebutuhan dasar kelompok rentan.

2. Dinamika Diskusi Kelompok

Dalam diskusi di kelompok II berkembang pandangan yang beragam dari peserta tentang defenisi kelompok rentan, namun secara umum peserta sepakat bahwa kelompok rentan adalah kelompok masyarakat yang selama ini tertinggal dan masih berada dalam kondisi yang tidak sejahtera, terutama di daerah konflik.

Peserta memahami bahwa kelompok rentan ini berpotensi menjadi kelompok yang miskin dan marginal apabila tidak ada strategi yang tepat dalam penanganan persoalan perekonomian mereka. Dari hasil diskusi disimpulkan kelompok rentan yang harus diprioritaskan adalah : (1) perempuan korban konflik, (2) generasi muda yang terlibat GAM atau kelompok anti separatis, (3) orang cacat akibat konflik, dan (4) buruh urban, yaitu buruh kasar yang datang dari desa-desa ke kota karena di daerah asal tidak mempunyai pekerjaan.

Peserta yang berjumlah 7 orang berasal dari masyarakat korban konflik, ulama/pemimpin pesantren, aktifis LSM, eks kombatan GAM, dan staff dinas sosial. Tempat asal mereka juga beragam mewakili Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, dan Aceh selatan.

Peserta diskusi berpendapat bahwa pemberdayaan terhadap kelompok Perempuan Paska konflik masih kurang. Perekonomian perempuan masih tertinggal karena strategi bantuan kurang tepat, misalnya bantuan terlalu kecil dan tidak tepat sasaran. Selain itu perempuan sulit mencari pekerjaan karena tidak punya keterampilan dan kualitas

⁵ Laporan assesment World Bank dan ASD 7-10 November 2007 di Kab Nagan Raya, Aceh Selatan, Bireuen dan Aceh Timur.

pendidikan perempuan secara umum masih rendah, disamping itu masyarakat menganggap perempuan bekerja sebagai kerja sampingan bukan sebagai pekerjaan utama⁶



Gambar 2. Perempuan buruh tambak, Gandapura, kab.Bireuen

Perempuan yang hidup di masa konflik juga mengalami trauma psikologi yang belum sepenuhnya hilang, terutama korban pemerkosaan dan kekerasan. Kebanyakan program untuk perempuan bersifat domestik, tanpa analisis potensi dan tanpa pendampingan.⁷

Pengangguran adalah masalah kedua yang merupakan tantangan setelah kemiskinan, menurut peserta diskusi biasanya pengangguran didominasi oleh generasi muda. Untuk situasi paska konflik generasi muda menjadi kelompok yang rentan kembali mejadi pemicu apabila tidak segera mendapat pekerjaan. Persoalan ini seharusnya di barengi dengan strategi menciptakan lapangan kerja massal bagi pemuda(i) di Aceh paska konflik. Peningkatan SDM melalui pelatihan dan training serta pengalokasian dana pendidikan yang signifikan diyakini dapat membantu mencegah timbulnya kembali tindakan kekerasan demi mempertahankan hidup. Kelompok generasi muda ini bisa datang dari mantan kombatan, maupun bukan kombatan, kelompok antiseparatis dan remaja putus sekolah. Upaya yang dilakukan selama ini oleh berbagai pihak seperti pengadaan Balai Latihan Kerja, Program livelihood dan sebagainya masih harus terus dilanjutkan terutama dengan pendampingan yang berkelanjutan.

Bagi kelompok dengan keadaan cacat fisik peserta diskusi mengatakan bahwa selain bantuan modal mereka juga perlu dibantu merehabilitasi medik/fisiknya. Keterbatasan fisik tidak harus menghambat seseorang bekerja, asalkan jenis pekerjaan disesuaikan dengan kondisi fisiknya. Perlakuan khusus bagi mereka harus melalui analisa yang tepat, jangan sampai cacat fisik membuat mereka manja.

Berdasarkan jumlah penerima manfaat dari program reintegrasi BRA tahun 2005-2007 setidaknya ada 462.103 orang yang sudah mendapat bantuan dalam bentuk diyat, dana bantuan ekonomi, perumahan, tahanan politik dan bantuan cacat serta 15.909 orang yang belum mendapatkan bantuan.

⁶ Laporan Ilo 2006

⁷ Situasi Perempuan Tahun 2006; Sebuah Evaluasi, Gender working group dan wawancara stake holder.

Tabel.1. Jumlah Penerima Bantuan Korban Konflik^{8*}

KRITERIA	SUDAH TERIMA	BELUM TERIMA
GAM kombatan Sipil	3000 6200	
Tahanan politik	1.083	952
GAM menyerah sebelum MOU	3204	
Klp Antiseparatis	5000	1500
Korban konflik	233.115 penerima langsung 209.026 penerima tidak langsung	
cacat akibat konflik	1.475	13.457
TOTAL	462.103	15. 909

Kelompok rentan ini tersebar di seluruh provinsi Aceh, terutama di kabupaten yang intensitas konfliknya tinggi, seperti Pidie, Aceh utara, Aceh Timur, Bireuen, Bener Meriah, Aceh Barat, dll.

3. Hambatan

Peserta diskusi mengatakan bahwa kendala utama kelompok ini adalah:

(1) Minimnya perhatian terutama untuk orang cacat (2) Minimnya skill dan modal (3) Bantuan yang tidak tepat sasaran.

4. Solusi

Setelah melihat situasi kelompok rentan di atas, berikut ini adalah beberapa solusi bagi semua pihak yang ingin melakukan pemberdayaan bagi kelompok rentan.

a. Redefenisi dan Pendataan Ulang kelompok rentan di Aceh.

Hal ini penting dilakukan mengingat beragamnya defenisi soal kelompok rentan itu sendiri. Dinas Sosal misalnya mendefenisikan bahwa Kelompok rentan adalah kelompok yang berada diatas garis kemiskinan, dan dibawah garis pra sejahtera. Dimana akan sangat rentan menjadi miskin apabila tidak di tangani segera. Bila mengacu pada defenisi Dinas Sosial saja maka ada kelompok lain lagi yang tidak tertampung seperti pemuda eks kombatan, perempuan korban konflik, dan lain-lain.

b. Pemanfaatan lahan tidur

Di Aceh paska konflik banyak lahan tidur yang belum dimaksimalkan, beberapa penyebab lahan tidur seperti ditinggal paskan konflik, kurangnya sumber air, dan kondisi tanah yang kurang subur pada dasarnya menyimpan potensi besar apabila sutruktur dan infrastrukturnya mencukupi.

⁸ Data ini diolah berdasarkan jumlah penerima manfaat dari program BRA-PPK tahun 2005-2007

c. Sokongan modal

Persoalan modal adalah hal yang paling banyak dikeluhkan oleh masyarakat, Dalam diskusi berkembang bahwa modal yang selama ini sampai ke masyarakat sering tidak tepat sasaran atau jumlahnya terlalu kecil.

d. Pelatihan keterampilan wirausaha yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Ketiadaan modal usaha juga diperparah dengan ketiadaan skill atau keterampilan, sehingga sangat dibutuhkan peningkatan kapasitas kelompok rentan melalui kegiatan training dan keterampilan wirausaha.

e. Pola pemberdayaan yang berbasis potensi ekonomi daerah asal kelompok rentan

Pemberdayaan berbasis potensi daerah menjadi penting guna menjaga keberlanjutan dan sinergi antar potensi daerah. Pola ini akan menjamin lahirnya komoditi unggulan dimasing-masing wilayah di Aceh dengan tetap menjaga persaingan yang sehat antar kabupaten serta membuka lapangan kerja yang merata.

FGD Kelompok III

Topik: Kebijakan Pemerintah dalam Mendukung Perekonomian Rakyat

1. Latar Belakang Pemilihan Topik

Berdasarkan hasil penilaian tim WB dan ASD sebelum pelaksanaan lokakarya, menunjukkan kesan kuat bahwa pemerintah belum memiliki kebijakan strategis dalam mendukung perekonomian rakyat. Beberapa kegiatan ekonomi yang dikunjungi menunjukkan bahwa beberapa persoalan besar yang sering dihadapi masyarakat adalah menyangkut tambahan modal usaha dan peningkatan sumber daya manusia. Namun, menurut masyarakat, meskipun pemerintah—baik di level provinsi maupun kabupaten—berhasil menghasilkan program yang bertujuan mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut, tetapi hal itu tidak berdampak signifikan terhadap kemajuan kegiatan ekonomi mereka. Salah satu kebijakan yang sering dijadikan contoh oleh masyarakat adalah Kredit Pemakmu Nanggroe (KPN), dan berbagai program pengembangan LKM. Namun demikian persoalan terbesar masyarakat tetap saja berputar sekitar kesulitan mereka untuk mengakses modal usaha.

2. Dinamika FGD

Berangkat dari diskusi yang lebih fokus, peserta FGD mencoba mengidentifikasi persoalan besar lainnya sekitar kebijakan dan dukungan pemerintah untuk memberikan dukungan permodalan kepada masyarakat. Ternyata hal yang paling sensitif dihadapi masyarakat dalam meningkatkan kapasitas usaha perekonomian mereka adalah pada empat hal utama, yaitu; *akses permodalan, SDM pelaku, birokrasi, dan reintegrasi.*

3. Problem Akses Permodalan

Pentingnya masalah permodalan sangat terkait erat dengan ketersediaan lembaga permodalan itu sendiri, seperti perbankan, koperasi, LKM. Secara keseluruhan saat ini di Aceh terdapat lembaga-lembaga seperti;

No.	Lembaga	Jumlah	Penjelasan
1.	Bank	224 unit	Aktif
2.	Koperasi	2.112 unit	Aktif

Setelah tsunami, Aceh juga mendapat perhatian khusus dari pemerintah dengan berdirinya Perseroan Permodalan Nasional Madani (PNM).⁹ Lembaga ini berusaha memberikan solusi pembiayaan pada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK). Selain itu, PNM juga bekerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan seperti Lembaga Modal Ventura, Bank Umum/Syariah, Koperasi Simpan Pinjam, BPR/S, maupun Lembaga Keuangan Mikro/Syariah lainnya di seluruh propinsi Indonesia. Namun demikian, persoalan kesulitan akses modal juga belum terjawab.

⁹ PT.Permodalan Nasional Madani (Persero)/PNM, sebuah Lembaga Keuangan Khusus yang sahamnya 100% milik Pemerintah, didirikan di Jakarta berdasarkan TAP XVI/MPR/1998, Letter of Intent IMF tanggal 16 Maret 1999, PP No. 38/99 tanggal 25 Mei 1999 dan Akte Notaris No. 1 tanggal 1 Juni 1999 yang mendapat pengesahan Menteri Kehakiman RI No. C-11.609.HT.01.01.TH 99 tanggal 23 Juni 1999. Dari modal dasar perseroan ini sebesar Rp. 1,2 trilyun, telah ditempatkan dan disetorkan sebesar 300 milyar. (www.pnm.co.id)

Berbagai kebijakan tersebut masih belum sejalan, mengingat angka pengangguran di Aceh saat ini masih tergolong tinggi. Walaupun trend-nya cenderung menurun, dimana sejak tahun 2006, dari jumlah angkatan kerja yang tersedia 1.789.850 orang, tingkat pengangguran sebesar 12 persen (211.356 orang), sedangkan pada tahun 2007 ini, dengan jumlah angkatan kerja 1.832.842 orang, tingkat pengangguran berkurang menjadi 10 persen (188.126 orang).¹⁰ Hal ini juga sangat mengkhawatirkan pihak Dinas Tenaga Kerja Provinsi NAD sendiri, bahwa angka tersebut menurut mereka akan terus meningkat sehubungan dengan berakhirnya masa tugas NGO di Aceh. Hingga Oktober 2007 tercatat 1.200 tenaga kerja mengalami pemutusan kontrak kerja di berbagai NGO, dan pada akhir 2007 angkanya bakal melonjak jadi 2.000 orang, sehingga setelah tsunami angka pengangguran tersebut rendah dan kemudian semakin meningkat.¹¹

Kondisi tersebut secara langsung akan berdampak kepada peningkatan angka kemiskinan, sehingga pemerintah harus mananggapi persoalan ini secara luas, dan salah satunya adalah pemberian akses kepada masyarakat mengenai modal. Untuk itu, sepanjang berlangsungnya FGD para peserta mencoba mengidentifikasi beberapa persoalan mengenai sulitnya melakukan akses modal;

a. Kebijakan Pemerintah Daerah yang belum efektif

KPN (Kredit Peumakmu Nanggroe) adalah salah satu alasan kuat untuk bagi kita untuk menyatakan kalau kebijakan pemerintah mengatasi kesulitan permodalan di tengah-tengah masyarakat masih belum tepat. Menurut analisis para ekonom lokal di Aceh, bahwa kebijakan tersebut baru hanya bagus dalam ide, namun tidak terbukti dalam realitasnya. Dengan menyerahkan kewenangan untuk menyalurkan dana ini kepada PT. BPD Aceh belumlah langkah tepat mengingat cabang BPD masih terbatas di tingkat ibukota kabupaten saja di Aceh. Selain itu masyarakat juga terkendala dengan model kredit perbankan yang selalu mengharuskan adanya agunan.¹²

Disamping itu juga perlu diperhatikan kebijakan perbankan sendiri, dimana dari total dana pihak ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun perbankan per Desember 2006 yang mencapai sebesar Rp 21.141 triliun, hanya sebesar Rp 4.452 triliun dana kredit yang disalurkan kembali ke masyarakat. Rendahnya pertumbuhan kredit juga dikarenakan adanya kredit konsumsi yang menyumbang 43 persen dari total kredit tahun 2006, atau naik rata-rata 22 persen sebelum tsunami. Sedangkan kredit investasi terus mengalami penurunan tajam, dari sebelumnya sekitar 47 persen tahun 2002 menjadi 20 persen per Desember 2006.¹³

Selain itu peserta diskusi juga mengkritisi lemahnya kebijakan pemerintah untuk melahirkan suatu regulasi mengenai permodalan, terutama dalam bentuk peraturan daerah (Qanun) yang langsung mengatur tentang pemberian dan penyediaan modal kerja bagi masyarakat. Secara lebih spesifik, sebagai perwujudan cita-cita penerapan syari'at Islam, melalui Qanun nomor 10 tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam juga telah mensinyalir pembuatan aturan mengenai permodalan dalam

¹⁰ The World Bank, *Analisis Pengeluaran Publik Aceh*, The World Bank, 2006

¹¹ Dinas Tenaga Kerja Provinsi NAD, *Ribuan Pekerja NGO di-PHK*, www.disnaker.nad.go.id

¹² Aceh – Eye, *Permohonan Kredit Peumakmu Nanggroe Terkendala Agunan*, www.accheye.org, berita utama, Senin, 11 Februari, 2008

¹³ The World Bank, *Op. Cit.*

Islam (qiradh) sebagai salah satu kewenangan bagi mahkamah syari'iyah, namun hingga saat ini belum terealisasi. Dengan Qanun itu pula diharapkan bahwa pemberian modal usaha agar lebih berpihak kepada masyarakat miskin dan orang yang sangat membutuhkan.

b. Masyarakat terkendala dengan administrasi

Permasalahan birokrasi ini menurut peserta FGD lebih kepada persoalan kesulitan masyarakat mengakses modal di lembaga-lembaga permodalan akibat sulitnya birokrasi yang mereka terapkan. Sebagaimana informasi di atas, bahwa bank sebagai lembaga permodalan dengan modal terbesar memiliki birokrasi yang lebih berat akibat agunan yang diterapkannya. Permasalahan kemiskinan dan permodalan pada dasarnya bukan terkendala dengan tingginya suku bunga dan mekanisme pengembalian, tapi kendala utamanya adalah dengan ketidakmampuan masyarakat menyediakan agunan yang setara dengan keinginan perbankan.

Untuk mengatasi hal itu, peserta FGD merekomendasikan lembaga permodalan yang dapat mengatasi kesulitan tersebut. Mereka sadar bahwa tidak dapat berharap banyak dari reformasi yang dilakukan perbankan, karena walau bagaimanapun bank tidak pernah mau dirugikan, sehingga solusinya adalah mereka menghendaki model atau mekanisme yang pernah dikembangkan oleh koperasi.

c. Minimnya pendampingan lembaga pemberi modal kepada masyarakat

Menurut peserta diskusi, bahwa pendampingan adalah hal yang sangat penting dilakukan, terutama oleh lembaga pemberi modal. Hal ini terkait erat dengan keterbatasan SDM masyarakat dalam menjalankan usaha, sehingga dengan model pendampingan tersebut masyarakat dapat mempergunakan bantuan permodalan itu sebaik mungkin. Pelatihan dan pembinaan yang dilakukan hendaknya sejalan dengan pemberian modal, yang dapat dilakukan oleh pemberi modal sendiri, maupun tenaga-tenaga ahli lain yang dapat dilibatkan sebagai model *sustainabilities livelihood* yang saat ini sedang dikembangkan.

Sebagai bukti nyata dari hasil survey WB-ASD di bulan November 2007, bahwa sebagian besar masyarakat melakukan kegiatan ekonomi mereka dengan modal pengalaman saja, tanpa diiringi penguatan pengetahuan mengenai strategi peningkatan produksi, penjualan, akses pasar, dan persaingan harga.

Berbagai sumber dana telah dikururkan ke masyarakat, baik dari perbankan, pemerintah, dan juga para donor NGO/INGO dengan berbagai programnya, termasuk perbankan syari'ah yang sejak setelah tsunami juga semakin berperan di Aceh.

FGD 4; Pemberdayaan lembaga ekonomi kerakyatan

1. Alasan pemilihan topik

Merujuk pada pendapat para pakar ekonomi, ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat.¹⁴ Mereka bergelut di bidang ekonomi informal, dan biasanya seperti petani kecil, nelayan, peternak, pekebun, pengrajin, pedagang kecil dll.¹⁵ Dengan demikian dapat dipahami, bahwa hubungan dengan lembaga ekonomi kerakyatan adalah lembaga ekonomi yang tumbuh sejalan dengan kegiatan ekonomi rakyat selama ini.

Berdasarkan keadaan perekonomian masyarakat Aceh pada umumnya, dan diperkuat oleh hasil assessment team WB – ASD ke pantai timur dan barat Aceh, ditemukan bahwa salah satu persoalan besar ekonomi kerakyatan di Aceh saat ini, adalah minimnya ketersediaan modal usaha dan juga lembaga akses modal yang mengakomodir berbagai kebutuhan modal masyarakat hingga ke desa.

2. Jenis-jenis lembaga ekonomi kerakyatan

Pada awalnya FGD cenderung mengarah pada pembicaraan lembaga ekonomi pada umumnya. Namun selanjutnya peserta FGD menemukan kendala besar mengenai eksistensi lembaga ekonomi dan kaitannya dengan kebutuhan masyarakat terhadap modal usaha. Selanjutnya arah FGD berlanjut kepada permasalahan yang lebih spesifik, yaitu mengenai lembaga ekonomi yang mampu menyediakan modal bagi perekonomian masyarakat, mudah diakses, bertanggungjawab meningkatkan kapasitas dan kemampuan masyarakat dalam berwirausaha, dan berkembang dari lembaga akses modal yang diinginkan masyarakat.

Secara umum, selama ini masyarakat mengakses modal kepada lembaga-lembaga penyedia modal formal dan non-formal, seperti perbankan (Undang-undang Perbankan Nasional No. 28 tahun 1999) dan koperasi (Undang-undang Perkoperasian No. 25 tahun 1992, dan Qanun Nomor 9 tahun 2004). Sedangkan yang informal adalah lembaga-lembaga ekonomi bentukan masyarakat, seperti simpan-pinjam modal yang dilakukan oleh para perempuan, petani, pedagang, dan nelayan di desa-desa.

3. Masalah;

Kebutuhan masyarakat terhadap modal

Untuk melakukan suatu kegiatan usaha, sedikitnya masyarakat membutuhkan lima modal utama, yaitu; teknologi, manajemen, strategi pemasaran, dan penguatan kapasitas. Paska tsunami dan konflik, kebutuhan pembangunan ekonomi masyarakat lebih mengarah kepada ketersediaan modal disamping kebutuhan lainnya. Hasil survey ILO di Aceh paska Tsunami dan Konflik menunjukkan 93,5 persen kebutuhan kegiatan microfinance masyarakat saat ini adalah dalam bidang modal (Mercy Corps and ILO; 2006).

Kenyataan ini dapat diterima, dimana modal adalah hal utama yang dibutuhkan masyarakat untuk menggerakkan kembali usaha dan pekerjaan mereka yang pernah hancur akibat kedua bencana tersebut. Paska konflik dan tsunami tahun 2004 lalu, Aceh menduduki posisi keempat termiskin di Indonesia, dengan angka kemiskinan mencapai

¹⁴ Laica Marzuki, *Penerapan Sistem Ekonomi Kerakyatan Dalam Kerangka Paradigma Pembangunan Kemandirian Lokal*, <http://www.pascaunhas.net>,

¹⁵ Mubyarto, *Jurnal Ekonomi Kerakyatan* (www.ekonomirakyat.org).

1,2 juta jiwa (28,5 persen). Angka ini sebenarnya sudah meningkat tajam sejak tahun 2001 dari angka kemiskinan sebelumnya pada tahun 2000 yang sudah mencapai 14 persen. Pada tahun 2001 angka kemiskinan meningkat tajam mencapai 30,43 persen, dan pada tahun 2002 terus naik mencapai 33,43 persen, dan terakhir pada tahun 2003 mencapai 40 persen.¹⁶

Di sisi lain, angka pengangguran di Aceh masih terbilang tinggi. Hingga tahun 2007 ini saja, Dinas Tenaga Kerja Prov. NAD mencatat angka pengangguran di Aceh mencapai 3331.949 orang dari 2.677.900 penduduk Aceh usia kerja.¹⁷

Dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pemberian modal, berbagai pihak baik lembaga sosial kemasyarakatan, donor asing, bahkan pemerintah melalui BRR dan BRA telah melakukan supply bantuan. Untuk tahun anggaran 2005 dan 2006, BRR melalui program pemberdayaan koperasi dan UKM melalui LKM pada 21 kota/kabupaten di Aceh, telah mendanai sebanyak 136 LKM dengan dana sebesar Rp. 77.341.394.000,- dengan jumlah peserta program sebanyak 29.813 orang pelaku UKM.¹⁸ Demikian juga kebijakan pemerintah daerah dengan program penyaluran Kredit Peumakmu Nanggroe (KPN) melalui Bank BPD Aceh, yang hingga saat ini dengan berbagai permasalahannya masih belum menjawab persoalan kekurangan modal dalam masyarakat.¹⁹

Melemahnya peran lembaga ekonomi kerakyatan di Aceh

Demikian juga dengan lembaga koperasi yang sudah sejak lama diakui sebagai lembaga ekonomi rakyat, dimana Sebanyak 40 Persen (2.000 unit) Koperasi di Aceh yang tersebar di 23 kabupaten/kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), dilaporkan tidak aktif sebagai dampak dari konflik berkepanjangan dan bencana tsunami, 26 Desember 2004.²⁰

Sebagai dampak dari fenomena itu, maka masyarakat kembali memanfaatkan modal yang ada di lingkungan sosial mereka sebagai solusi cepat mendapatkan modal usaha. Para pemilik modal besar dalam masyarakat menjadi tumpuan para petani dan pedagang di pedesaan untuk menjalin kerjasama guna mendapatkan modal usaha. Petani kopi di dataran tinggi Gayo, petani pala di Aceh Selatan, nelayan di pesisir pantai Aceh, dan juga para petani palawija semuanya terjebak kepada praktek tengkulak karena tidak adanya lembaga akses modal alternatif yang memadai untuk mereka. Perbankan yang terkadang hadir ke tingkat kecamatan hingga saat ini juga masih belum membantu. Birokrasi dan persyaratan yang mereka tetapkan semakin tidak memungkinkan masyarakat kecil untuk mengaksesnya.

4. Solusi;

a. Kriteria lembaga ekonomi yang dibutuhkan masyarakat

Berdasarkan hasil FGD, masyarakat sangat membutuhkan adanya lembaga yang dapat memberdayakan masyarakat sekaligus meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menjalankan kegiatan usaha mereka. Selanjutnya wadah ini

¹⁶ The World Bank, *Analisis Pengeluaran Publik Aceh*, The World Bank, 2006

¹⁷ Dinas Tenaga Kerja Provinsi NAD, 2008

¹⁸ www.amf.com

¹⁹ www.serambinews.com

²⁰ Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NAD, 2007

juga penting untuk menyadari bahwa berbagai kegiatan sedang dilakukan dalam rangka rehabilitasi, rekonstruksi, dan reintegrasi Aceh paska tsunami dan konflik, sehingga berbagai peran harus mereka mainkan dengan baik.

Selain itu, peserta FGD juga memberikan pertimbangan yang sangat efisien, dimana Aceh saat ini sangat penting untuk merevitalisasi lembaga ekonomi kerakyatan yang telah ada agar bisa digerakkan kembali.

Lembaga tersebut hendaknya memiliki prinsip, seperti; kemitraan, milik bersama, terbuka/transparan, demokrasi, legal, berpihak kepada kepentingan masyarakat, berkesinambungan, peduli terhadap lingkungan, dan memiliki sensitif terhadap isu-isu gender. Sedangkan tujuan utama yang sangat diharapkan adalah;

- 1) Meningkatkan pendapatan masyarakat dan anggota.
- 2) Menumbuhkembangkan potensi ekonomi masyarakat, terutama miskin.
- 3) Menempatkan masyarakat dalam sistem kelembagaan ekonomi.
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan SDM masyarakat.

b. Kriteria dan prinsip memenuhi prinsip-prinsip lembaga perkoperasian

Dari diskusi panjang tersebut, peserta FGD mencoba meninjau sejarah perkembangan perkoperasian di Indonesia, khususnya Aceh. Melalui kriteria dan prinsip yang didiskusikan, maka kesepakatan jatuh pada program revitalisasi peran lembaga perkoperasian di Indonesia. Forum diskusi melihat bahwa masyarakat tidak bisa terlalu banyak berharap dengan bantuan dan juga kredit perbankan, sehingga wadah koperasi dipandang penting untuk berperan dan menjalin kerjasama lebih besar.

c. Praktek koperasi di Indonesia dan Aceh

Pada dasarnya koperasi berdiri karena tidak terpecahkannya masalah kemiskinan atas dasar semangat individualisme. Di Indonesi, sejarawan koperasi mengatakan lembaga ini baru berdiri di tahun 1896 (Ahmed; 1964), dengan kegiatan awal pada simpan pinjam, dan selanjutnya terus berkembang pada penyediaan barang konsumsi hingga ke barang-barang keperluan produksi (Masngudi; 1989). Tanpa melupakan sejarah panjang tersebut, dimana koperasi telah berkembang dengan berbagai keberhasilannya, hingga saat ini Mubyarto juga menyimpulkan bahwa faktor utama kemunduran perkoperasian Indonesia dimana koperasi tidak lagi merupakan koperasi anggota dan malah menjadi koperasi pengurus, sehingga kegiatan tidak lagi berdasarkan kebutuhan anggota, mengutamakan restu anggota dalam mencari kegiatan, dan mencari keuntungan atas nama anggota (Mubyarto; 2003).

Kondisi ini juga menggerogoti perkoperasian di Aceh. Data statistik Aceh dalam Angka tahun 2003, Aceh memiliki 4.752 unit koperasi, termasuk yang berbentuk KUD dan non-KUD. Nemun jika dilihat dari pernyataan kepala Dinas Koperasi Prov. NAD, sekitar 40 Persen (2.000 unit) koperasi di Aceh tidak berjalan lagi. Persoalan ini lebih utama disebabkan oleh buruknya manajemen perkoperasian di Aceh selama ini. Untuk tahun 2007 saja, pemerintah pusat telah

mengalokasikan dana 6 milyar untuk mendanai kembali koperasi di seluruh Aceh.²¹

Selain itu, peserta diskusi juga memaparkan tentang buruknya manajemen koperasi selama ini yang cenderung lebih memperkaya pengurus daripada anggota. Dari catatan mereka banyak melihat berbagai penyimpangan dan praktek yang tidak produktif lainnya sehingga kredibilitas lembaga koperasi tidak dipercayai lagi oleh masyarakat.

d. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, maka dibutuhkan revitalisasi peran lembaga koperasi dengan syarat-syarat tertentu.

Dengan latar belakang persoalan di atas, maka pada prinsipnya peserta FGD tetap berkeinginan agar lembaga koperasi dapat direvitalisasi kembali. Dengan manajemen yang baik, peraturan dan pengawasan yang ketat lembaga kerjasama masyarakat ini dapat berperan lagi untuk membangun perekonomian masyarakat.

Dalam memainkan perannya, peserta FGD merekomendasikan agar koperasi dapat menjadi lembaga yang menjembatani berbagai kesulitan masyarakat untuk mengakses sumber dana dari lembaga pemerintah, perbankan, microfinance, dan lainnya. Dan dengan manajemen yang baik para donor melalui lembaga rehab rekon Aceh juga dapat memanfaatkan keberadaan koperasi.

Koperasi harus dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus juga meningkatkan kapasitas masyarakat. Bahkan sebagai suatu struktur yang telah mengalami reformasi, koperasi diharuskan untuk dapat;

- 1) Mengadopsi berbagai strategi, mekanisme, dan sistem yang telah berhasil dilakukan oleh organisasi lain,
- 2) Memperkuat kapasitas kelembagaan koperasi yang hingga saat ini telah banyak hancur dalam masyarakat, dan
- 3) Membuka kewenangan bagi pemerintah untuk membubarkannya jika dalam jangka waktu yang telah ditentukan koperasi tersebut gagal menjalankan misinya.

²¹ Lebih detil pihak Bank Dunia juga mencatat, bahwa sebanyak 2.112 unit koperasi dari total 5.277 koperasi di Aceh tahun 2006, saat ini sedang tidak aktif. Hal yang positif dari tahun 2005 ke 2006 jumlah koperasi di Aceh bertambah 266 unit dari 5.011 unit di tahun 2005, namun terdapat permasalahan signifikan dimana jumlah koperasi yang tidak aktif dari tahun 2005 ke tahun 2006 bertambah hampir dua kali lipat, yaitu dari 1.262 unit menjadi 2.112 unit.

FGD Kelompok V

Topik: Strategi Revitalisasi Lahan Produktif

1. Latar Belakang Pemilihan Topik

Seperti halnya pemilihan topik di kelompok-kelompok lainnya, topik kelompok V juga dipilih berdasarkan hasil survey singkat yang dilakukan Tim WB dan ASD. Di Desa Paloh Pupu, Kecamatan Peulimbang, Kabupaten Bireun, tim survey menemukan kenyataan bahwa 45 ha kebun yang dulunya ditanami kacang kedelai sekarang hanya menjadi hamparan lahan yang tidak tergarap. Begitu pula di Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya. \pm 300 ha kebun terlantar. Dulunya kebun-kebun tersebut ditanami tanaman keras seperti karet dan sawit. Kedua persoalan di Bireun dan Nagan Raya disebabkan karena situasi konflik yang mendera Aceh beberapa tahun lalu. Sekarang, ketika situasi mulai damai dan keinginan memanfaatkan lahan-lahan terlantar tersebut masih ada, masyarakat dihadapkan kepada persoalan pembiayaan. Setidaknya untuk merevitalisasi lahan-lahan tersebut menghabiskan Rp. 5 juta – Rp. 8 juta per ha. Seandainya lahan-lahan tersebut bisa direvitalisasi, banyak kelompok rentan yang menganggur—seperti masyarakat miskin, kelompok pemuda penganggur, eks-kombatan—mendapatkan kesempatan yang baik untuk bisa bekerja.

2. Dinamika FGD

Konflik menjadi salah satu faktor penyebab munculnya kasus seperti di Kabupaten Bireun dan Nagan Raya. Peserta FGD kelompok V yang berjumlah 12 orang mendiskusikan berbagai isu yang berkaitan dengan revitalisasi lahan ini, misalnya mengidentifikasi lahan-lahan pertanian dan perkebunan yang tidak bisa berproduksi secara optimal; penyebabnya; dan solusi-solusinya.

3. Identifikasi Permasalahan

Para peserta mengidentifikasi dua tipe lahan pertanian dan perkebunan yang tidak bisa berproduksi secara optimal. Kedua tipe lahan tersebut adalah lahan tidur dan lahan produktif. Peserta, dengan pengalaman dan informasi yang dimiliki, juga mengidentifikasi penyebab munculnya dua tipe lahan tersebut.

Tabel 8. Tipologi Lahan dan Akar Masalahnya

No	Tipologi Lahan	Akar Masalah
1	Lahan Tidur	Konflik; keterbatasan kapasitas SDM pelaku; kurangnya modal; infrastruktur dasar belum memadai; bertambahnya jumlah lahan kritis; konflik manusia vs hewan; sengketa lahan; budaya malas.
2	Lahan produktif	Pupuk langka dan mahal; penggunaan bahan kimia yang tidak proporsional; rendahnya kualitas SDM pelaku; jumlah infrastruktur irigasi kecil; hama dan penyakit; pola tanam tidak seragam; kekurangan modal; kekurangan benih atau bibit berkualitas; kualitas infrastruktur jalan rendah; kurangnya alat-alat pertanian

4. Solusi Umum;

Dari masing-masing akar masalah yang terdapat di kedua tipologi lahan tersebut, peserta kemudian mendiskusikan berbagai solusinya. Solusi-solusi tersebut bisa dilihat dari tabel berikut.

Tabel 9. Solusi Lahan Tidur

Konflik	SDM	Modal	Infrastruktur	Lahan Kritis	Konflik Manusia vs Hewan	Budaya Malas	Sengketa Lahan
Menjaga situasi damai yang sudah mulai tercipta saat ini.	Peningkatan intensitas penyuluhan kepada para pelaku; adanya lahan percontohan; pelatihan bagi para pelaku kegiatan; studi banding.	Kredit khusus bagi para pelaku; modal ventura; mengembangkan pola kemitraan dengan pihak swasta; intervensi pemerintah; bantuan melalui Lembaga Keuangan Mikro (LKM)	Pembuatan irigasi; pembangunan akses jalan ke sentra produksi.	Menghentikan illegal logging; reboisasi;	Menghentikan illegal logging; penertiban HPH; meminimalisir peladang musiman.	Kampanye “anti-malas” berbasis lembaga adat atau pesantren; trining motivasi pertanian; menjadikan proyek percontohan yang sukses sebagai media untuk memotivasi pelaku lainnya.	Intervensi pemerintah;

Tabel 10. Solusi Lahan Produktif

Kelangkaan pupuk	Penggunaan Kimia Tidak Proporsional	Kualitas SDM Rendah	Infrastruktur Irigasi	Hama & Penyakit	Pola Tanam	Kekurangan Modal	Kekurangan Benih & Bibit	Infrastruktur Jalan	Ala Pro Pert
Peningkatan	Penyuluhan	Pelatihan	Menambah	Melakukan	Pengaturan	Skim kredit	Pelatihan	Membangun	Peng

pengawasan distribusi pupuk; sangsi berat bagi spekulasi pupuk; pengadaan pupuk alternatif	penggunaan pupuk dan pestisida secara intensif	bagi petani; studi banding.	jumlah irigasi; memperluas jaringan irigasi; rehabilitasi irigasi yang rusak	program pengendalian hama dan penyakit	pola tanam	khusus bagi petani; modal ventura; mengembangkan kemitraan dengan pihak swasta; penyaluran bantuan finansial melalui LKM	penangkaran bibit atau benih; riset pengembangan benih unggul	akses jalan ke sentra produksi; merehabilitasi jalan yang rusak	dan distribusi alat-alat produksi pertanian kepada petani
--	--	-----------------------------	--	--	------------	--	---	---	---

5. Solusi Strategis;

Salah satu solusi strategis yang bisa ditindaklanjuti dalam waktu dekat adalah memanfaatkan potensi ekonomi di sektor pertanian atau perkebunan melalui lahan tidur yang terdapat di masing-masing kabupaten.

Tabel 11. Ketersediaan Lahan Kering & Marjinal (Terlantar), Provinsi NAD, Tahun 2004

No.	Kab/Kota	Lahan		Sawah	
		Lahan Tidur (ha)	Luas Total (ha)	Sawah Terlantar (ha)	Sawah Tergarap (ha)
1	Sabang	0	403	26	10
2	Banda Aceh	4.221	13.827	240	586
3	Aceh Besar	19.345	104.228	3.696	30.421
4	Pidie	2.626	67.648	670	38.796
5	Bireun	20.994	129.483	2.242	22.948
6	Aceh Utara	45.842	390.115	2.907	38.831
7	Lhokseumawe	12.314	68.359	428	1.768
8	Aceh Tengah	23.979	69.926	109	19.516
9	Aceh Timur	20.486	123.794	6.931	35.746
10	Langsa	9.452	36.235	298	1.925
11	Aceh Tamiang	21.605	82.284	7.719	20.022
12	Aceh Tenggara	419	12.032	397	17.224
13	Gayo Lues	3.581	11.990	236	8.215

14	Aceh Jaya	9.867	24.901	3.151	9.294
15	Aceh Barat	13.330	54.376	7.493	21.551
16	Nagan Raya	11.760	30.453	1.435	16.698
17	Simeulue	4.991	19.461	8.073	19.330
18	Aceh Singkil	21.505	59.895	4.660	13.433
19	Aceh Selatan	45.331	151.255	2.019	23.814
20	Aceh Barat Daya	48.312	113.233	873	16.269

Sumber: Dinas Pertanian Prov. NAD, 2004

Tabel di atas secara jelas menunjukkan bahwa, kecuali Sabang, masing-masing wilayah memiliki lahan tidur yang berpotensi untuk digarap. Idealnya, lahan tidur tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat—tentunya dengan intervensi keuangan yang memadai oleh lembaga lain—untuk memproduksi komoditi yang dulunya pernah ditanam di lahan tidur tersebut ataupun komoditi unggulan dari wilayah tersebut, misalnya kelompok rentan di Bireun dibantu untuk memanfaatkan lahan tidur dengan menanam kacang kedelai.

FGD kelompok VI : Strategi Pemasaran Komoditi Rakyat.

1. Alasan pemilihan topic

Topik “Strategi Pemasaran Komoditi Rakyat” dipilih setelah Tim WB dan ASD melakukan survey ke wilayah pantai Barat-Selatan dan Utara-Timur. Salah satu temuan yang menjadi alasan kuat diangkatnya topik ini adalah ketika tim mengunjungi Kabupaten Aceh barat. Begitu juga dengan kabupaten Nagan Raya yang pernah menjadi sentra produksi karet alam Aceh. Persoalan yang sering dihadapi oleh warga setempat adalah bagaimana hasil produksi mereka bisa terjual dengan harga yang memadai sehingga bisa meningkatkan taraf hidup keluarga. Di kecamatan Seunagan Timur, Nagan Raya, warga pedalaman telah lama mengungsi akibat konflik. Mereka terpaksa meninggalkan lahan perkebunan yang telah menjadi sumber mata pencaharian turun temurun. Setelah konflik berakhir dan mereka kembali ke perkampungan, banyak lahan karet dan kelapa telah rusak akibat serbuan gajah liar. Atas bantuan beberapa lembaga asing dan pemerintah kini mereka menata kembali kehidupan dan perkebunan karetnya. Persoalan baru yang muncul adalah rendahnya harga hasil produksi karet yang mereka hasilkan. Untuk ukuran lokal, harga yang mereka jual sudah termasuk tinggi dan itu telah menumbuhkan gairah para pekerja perkebunan untuk bekerja lebih giat lagi. Setengah hari menderes karet, mereka bisa mendapatkan penghasilan Rp. 100,000. Namun harga di daerah ini sebenarnya jauh dari harga pasar. Harga pasar yang dimaksud adalah harga di kota Medan. Persoalan harga ini bukan hanya karena jauhnya jarak yang harus di tempuh untuk membawa produk perkebunan itu ke Medan, namun juga menyangkut persoalan pengelolaan hasil produksi paska panen. Ketiadaan prabrik pengolahan karet di lokasi terdekat serta kualitas hasil panen yang kurang membuat penentuan harga berada di tangan toke pengumpul. Oleh karena itulah diharapkan kedepan, pemerintah dan berbagai pihak bisa melihat potensi perkebunan tersebut dan menata bagaimana masyarakat harus bekerja menghasilkan produk yang lebih baik dan harga yang memuaskan. Persoalan yang sama juga dialami oleh para petani di daerah dataran tinggi Gayo dan sekitarnya. Sejak dulu wilayah ini telah dikenal sebagai sentra produksi sayur mayur dan buah-buahan segar selain kopi organiknya.

2. Dinamika FGD

Group ini terdiri dari 6 orang peserta yang berasal dari kabupaten yang berbeda seperti Aceh Tengah, Aceh barat, aceh timur, Bireuen dan Banda Aceh, dengan latar belakang pekerjaan yang berbeda pula. Masing-masing peserta mengutarakan persoalan utama yang mereka hadapi ketika memasarkan produksi pertaniannya. Dalam sesi focus group discussion para peserta berhasil melakukan pemetaan berbagai masalah yang biasanya mereka hadapi ketika musim panen tiba serta persoalan dalam melakukan proses distribusi hasil pertanian, serta merumuskan solusi terhadap persoalan-persoalan tersebut.

3. Pemetaan Masalah

Dari proses tukar pikiran dan berbagi pengalaman antar peserta FGD, terungkap beberapa persoalan utama yang di hadapi anggota tim ini diantaranya menyangkut kondisi infrastruktur yang masih dibawah standar, informasi yang minim tentang pasar dan harga produk pertanian, serta kesulitan mengakses pasar nasional dan internasional.

a. Infrastruktur

Infrastruktur transportasi darat berupa jalan dan jembatan tetap merupakan urat nadi utama saat ini dan tahun-tahun mendatang dalam menunjang pergerakan perekonomian rakyat di seluruh wilayah dalam propinsi Aceh. Banyak jalan di aceh masih berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan baik diwilayah yang dulu mengalami konflik bersenjata maupun akibat terjangan tsunami. Kondisi seperti ini akan membuat daerah terpencil semakin terasing dan berakibat negatif pada system distribusi hasil pertanian warga. Hingga hari ini pemerintah Aceh masih memiliki kemampuan teknis dan keuangan untuk membangun system jalan raya. Untuk wilayah pantai barat Aceh, jalan sepanjang 122 km antara Calang dan Meulaboh telah selesai diperbaiki, namun antara Banda Aceh dan Calang sepanjang 156 km diperkirakan belum akan selesai dalam tahun 2008 ini. Selain itu beberapa jembatan masih belum dapat menampung beban lebih dari 10 ton. Panjang jalan kabupaten/kota dalam propinsi NAD mencapai lebih kurang 15.458 km di mana 3.053 km diantaranya dalam kondisi baik dan 2.994 km rusak parah, sedang sisanya dalam keadaan sedang dan rusak. Sedangkan bila dilihat dari permukaannya, lebih dari sepertiga jalan tersebut bertanah. Secara umum kondisi jalan di Aceh 61 persen dalam keadaan sedang/moderat, 20 persen baik dan 19 persen rusak. Di Aceh juga terdapat sekitar 794 buah jembatan dimana 659 diantaranya dalam kondisi yang baik²². Persoalan jalan ini terutama sangat dikeluhkan oleh peserta dari Aceh tengah yang kebetulan berprofesi sebagai petani. Jalan yang sempit dan sering longsor membuat toke sayur enggan menjangkau desa mereka untuk membeli hasil kebun seperti tomat, sawi dan lain-lain. Akibat situasi ini tidak jarang tomat dan sayur mayur tersebut terbuang dan membusuk.

Selain jalan, pelabuhan juga merupakan sarana yang tidak kalah pentingnya dalam memainkan peran sebagai pensuplai logistic dan juga sebagai elemen penting dalam revitalisasi ekonomi. Sebagian besar pelabuhan di pantai utara dan barat Aceh, termasuk simeulue rusak berat atau hancur akibat gempa dan tsunami. Dalam dua tahun proses rehabilitasi pelabuhan laut dan terminal fery telah mengalami kemajuan pesat sehingga dapat digunakan walaupun masih bersifat sementara. Sarana pelabuhan sementara tersebut telah di bangun di Sinabang dan Calang. Tsunami telah mengakibatkan kerusakan yang sangat serius terhadap pelabuhan perikanan, dermaga, dan pra sarana perikanan. Pendangkalan banyak muara dan jalan masuk sungai yang sulit dan berbahaya, dan lingkungan pantai masih tetap belum stabil di beberapa daerah.

b. Informasi harga komoditas yang tidak akurat.

Saat ini pertanian dan perikanan merupakan penyumbang sekitar 22 persen perekonomian Aceh. Kontribusi ini diharapkan meningkat dengan berkurangnya cadangan minyak dan gas. Pertanian juga merupakan sumber utama lapangan pekerjaan karena mampu memberikan pekerjaan bagi 50 persen tenaga kerja (lebih banyak lagi apabila petani perempuan dimasukkan sebagai tenaga kerja). Memajukan pertanian dan menghubungkan para petani baik perempuan maupun laki-laki dengan informasi, jasa penyuluhan, kredit, pemrosesan, dan pasar, merupakan kunci pemberantasan kemiskinan dan pengembangan yang berkelanjutan. Sector pertanian telah menunjukkan hasil yang beragam, dengan menurunnya produksi berbagai tanaman utama (misalnya kacang kedelai, cabai dan pisang). Diantara

²² Aceh dalam Angka, BPS Nanggroe Aceh Darussalam, 2005

hasil-hasil pertanian, sebagian besar adalah kopi, coklat, vanilla terhambat produksi skala kecil dan hasil yang tidak tetap. Pemrosesan hasil-hasil pertanian seperti beras dan kelapa jarang dilakukan di Aceh melainkan dilakukan di Sumatera Utara dan dikirim kembali ke Aceh untuk di konsumsi. Tentu saja ini sangat merugikan para petani dan masyarakat aceh secara keseluruhan. Sebagian besar petani di aceh memiliki mata pencaharian campuran yang terdiri dari berbagai kombinasi tanaman pangan, ternak, tanaman perkebunan dan perikanan²³.

Khususnya di daerah pedesaan yang terpencil, informasi mengenai harga komoditas hasil pertanian didapat oleh warga dari para pembeli / agen itu sendiri. Masyarakat tidak mendapat informasi secara akurat dan benar mengingat kepentingan dari para agen yang hanya ingin mengeruk keuntungan sebesar-besarnya melalui sistem transaksi yang mereka jalankan. Ada banyak alasan yang dikemukakan oleh para agen ketika masyarakat bertanya kenapa harga hasil pertanian mereka dihargai sangat murah. Para agen umumnya mengatakan bahwa ketika musim panen maka produksi pertanian melimpah sehingga harga dipasaran juga akan turun. Selain itu mereka juga beralasan bahwa kondisi jalan yang sulit dan jauh dari pasar membuat harga pengangkutan membengkak. Di daerah-daerah sentra produksi pertanian seperti di kabupaten Benar Meriah dan Aceh Tengah, kondisi jalan yang rusak dan sering longsor membuat para agen enggan datang sehingga tidak jarang para petani membiarkan hasil pertanian seperti tomat membusuk ditempat. Kondisi alam dan infrastruktur yang tidak memadai seperti ini sering kali membuat masyarakat tidak punya pilihan dalam menentukan harga jual hasil produksi. Para petani tidak memiliki informasi yang benar mengenai harga produk pertanian di pasaran. Walaupun ada beberapa media cetak local yang memuat informasi harga produksi pertanian, namun koran tersebut tidak sampai ke tangan petani di daerah terpencil, walaupun sampai biasanya sering terlambat beberapa hari.

c. Akses terhadap pasar.

Selama ini para petani hanya berhubungan langsung dengan para agen yang datang membeli di kebun warga. Warga tidak punya pilihan lain selain menjual, karena apabila produksi mereka tidak segera laku maka sayur mayur tersebut akan segera membusuk. Akibat dari buruknya infrastruktur jalan, para petani enggan membawa sendiri hasil kebunnya ke pasar karena menimbulkan biaya angkut yang tinggi. Beberapa kendala yang sering dihadapi oleh produsen/pelaku usaha di pedesaan dalam mengembangkan usaha pertanian dan hasil olahannya (agroindustri) di antaranya kualitas produk pertanian dan olahannya masih rendah dan mutunya tidak konsisten, penampilan (appearance) dari produk pertanian yang dihasilkan kurang menarik, kesinambungan produksi sulit dipenuhi, tingkat keamanan produk hasil pertanian dan olahannya yang belum pasti, penguasaan teknologi pascapanen dan pengolahan hasil masih rendah, terbatasnya peralatan dan modal serta lemahnya akses pasar (pemasaran).

4. Solusi.

Setelah berdiskusi panjang lebar membahas berbagai persoalan yang di hadapi, FGD akhirnya memasuki tahap mencari solusi. Ada banyak ide/solusi yang berhasil dikumpulkan dari peserta, namun setelah dilakukan diskusi lanjutan yang lebih intens dan fokus, akhirnya peserta FGD berhasil merumuskan beberapa hal yang diharapkan

²³ Aceh dan Nias, Dua tahun setelah tsunami, BRR 2006.

menjadi solusi yang tepat guna dalam menjawab berbagai persoalan yang mereka hadapi diatas. Solusi tersebut diantaranya :

1. Adanya gerakan yang nyata dari semua pihak. Baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau dinas terkait, swasta, lembaga permodalan, perguruan tinggi maupun masyarakat selaku konsumen. Upaya yang dapat dilakukan adalah pertama melakukan fasilitasi dan pendampingan kepada petani atau pelaku usaha kecil secara berkelanjutan dan terpadu. Hal ini untuk membantu mencari akses pasar terhadap hasil pertanian maupun olahannya sampai tercapai kemandirian. Dalam artian, petani/pelaku usaha mampu melakukannya sendiri.
2. Dengan mencintai dan mengkonsumsi produk pangan lokal secara konsisten sehingga akan dapat mempercepat tumbuhnya dan berkembangnya agroindustri di pedesaan. Sampai sekarang beberapa cara pemasaran hasil pertanian dan produk olahannya yang sudah umum dilakukan oleh petani/pelaku usaha kecil adalah dengan memasarkan langsung kepada masyarakat lokal, melalui pesanan, kegiatan pameran, serta pasar lelang. Sistem pemasaran seperti ini tampaknya belum mampu memberikan hasil sesuai yang diharapkan. Karena beberapa cara pemasaran di atas tidak dilakukan secara berkesinambungan.
3. Diperlukan strategi lain untuk mengatasi permasalahan pemasaran yang dihadapi oleh petani/pelaku usaha. Salah satu strategi yang bisa dipertimbangkan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan membuat suatu wadah/unit sebagai pusat informasi yang khusus menangani akses pasar atau peluang pasar bagi komoditi pertanian dan produk olahannya. Dengan adanya pusat informasi tersebut maka petani atau pelaku usaha kecil (home industry) akan dapat mengakses informasi secara cepat dan mudah untuk mengetahui peluang pasar terhadap hasil pertanian maupun produk olahannya. Di samping itu, dengan adanya pusat informasi ini maka masyarakat luas selaku konsumen akan dapat mengakses dan mengetahui informasi mengenai jenis dan jumlah komoditi pertanian dan hasil olahannya secara lengkap yang dihasilkan oleh produsen/pelaku usaha kecil yang ada di setiap kabupaten di.
4. Pembangunan infrastruktur di pedesaan sangat mendesak dilakukan mengingat mayoritas masyarakat petani di Aceh saat ini berlokasi menyebar sampai ke pelosok desa terpencil. Jalan dan jembatan merupakan sarana vital yang harus diprioritaskan, dilanjutkan dengan pembangunan dermaga perikanan di daerah-daerah sentra produksi perikanan serta pembangunan pasar yang representative yang mudah dijangkau oleh masyarakat luas.

3.4. Pertemuan Tim Perumus (hari ketiga)

Pada hari ketiga workshop, ada 3 kegiatan penting yang telah terlaksana, yaitu:

- 1) Presentasi hasil dari fokus grup diskusi, ada 6 kelompok FGD yang tampil dengan pembahasan untuk 6 topik yang berbeda, secara lengkap hasil presentasi kelompok dapat dilihat pada lampiran 1.

2) Pembentukan tim perumus, tim perumus dibentuk berdasarkan rekomendasi dan keaktifan peserta dalam presentasi dan mempertahankan ide-ide mereka dalam diskusi sesudah FGD. Anggota tim perumus terdiri dari, sebagai berikut:

1. Tgk. Nuruzzahri (tokoh agama)
2. Wiratmadinata (Forum LSM Aceh)
3. Cut Intan (Liga Inong Aceh NGO)
4. Ir. M. Isa Alba (pemerintah)
5. M. Adli Abdullah (dosen Unsyiah)
6. Agus Suheri (Consultant koperasi)
7. Taf Haikal (Businessman/NGO)
8. Ropian, SE (tokoh gerakan koperasi)
9. M. Yahya Kobat (ilmuwan)
10. Tgk. Marzuki (KPA Pusat)
11. Muslahuddin Daud (The World Bank)
12. Didit Setiawan (The World Bank)
13. Sri Wahyuni (The World Bank)
14. M. Yacob Abdi (Observer of Socio-Economic)
15. T. Isa Rahmadi (Sec-General ASD)
16. Nashiruddin Ahmad (Chairman ASD)
17. M. Hanafiah (Director Executive ASD)

3) Pertemuan tim perumus, dari pertemuan tim perumus telah dihasilkan beberapa rekomendasi yang menjadi tindak lanjut dari keseluruhan kegiatan workshop (mulai dari pemaparan makalah sampai dengan fokus grup diskusi). Rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Program Investasi harus dilakukan dengan pendekatan yang sesuai dengan potensi wilayah dan daya dukung lingkungan
2. Melarang investasi di bidang kelautan yang mengancam kelangsungan usaha masyarakat nelayan Aceh.
3. Realisasi segera power plant untuk mengatasi krisis energi di Aceh.
4. Setiap Kabupaten/Kota disarankan untuk memaksimalkan adanya komoditi unggulan yang ditetapkan di dalam Qanun Kabupaten/Kota.
5. Pemerintah Aceh diminta mencabut izin lahan-lahan HGU yang tidak produktif dan diberikan kepada masyarakat miskin yang tidak memiliki lahan.
6. Evaluasi dan/atau bubarkan BUMD yang tidak produktif yang hanya menghabiskan anggaran untuk program yang tidak bermanfaat bagi rakyat.
7. Segera merevitalisasi lahan-lahan yang selama ini terabaikan karena konflik dengan komoditas yang layak dan pernah digarap oleh masyarakat.
8. Segera merevitalisasi dan merekonstruksi lembaga-lembaga adat yang pernah ada di masyarakat guna meningkatkan perekonomian rakyat.
9. Membuka akses modal secara cepat dan mudah kepada kelompok rentan (perempuan/janda korban konflik atau tsunami, generasi muda, orang cacat korban konflik).

10. Khusus kepada eks-kombatan, tapol, napol, yang tidak mendapat pengakuan dalam MoU Helsinki, dan korban konflik perlu dilakukan pendekatan khusus. Untuk memudahkan pendampingan usaha ekonomi produktif dilakukan melalui kelompok dengan rancangan program yang tepat.
11. Pendampingan terhadap kelompok rentan harus dimulai dengan instrumen identifikasi bisnis yang mereka miliki.
12. Menambah dan memaksimalkan peran dan fungsi tenaga penyuluh pertanian dan perikanan serta peternakan agar hasil produksi optimal yang diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.
13. Wajib disediakan alokasi dana untuk modal usaha bagi masyarakat kecil yang bersumber dari dana APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, BRR, Donor, termasuk BUMN yang dikoordinir oleh lembaga gerakan koperasi.
14. Meminta kepada ASD (Acheh Society Development) bersama stakeholders untuk segera menindak lanjuti Rekomendasi tersebut melalui pelaksanaan kegiatan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dalam berbagai sektor yang sudah sangat mendesak. Untuk itu diperlukan penataan program pemberdayaan dimaksud untuk masa 5 dan atau 10 tahun mendatang guna menjawab sebagian masalah dalam memelihara perdamaian Abadi di bumi Nanggroe Aceh Darussalam.

3.5. Kontribusi Workshop

Secara umum, kontribusi workshop sangatlah jelas. Adanya ide-ide penting yang signifikan dari hasil pemaparan dan diskusi makalah (lihat uraian 3.2.1 sampai dengan 3.2.5); hasil fokus grup diskusi (lampiran 1); hasil presentasi kelompok (lihat lampiran 2); dan rekomendasi yang dihasilkan oleh tim perumus (lihat uraian 3.4).

Ide-ide dan isu-isu yang terlahir sedikit banyaknya telah menggambarkan kondisi riil dari kehidupan masyarakat Aceh saat ini, mulai dari potensi daerah sampai dengan permasalahan yang dihadapi. Rekomendasi dan isu-isu penting dari workshop adalah merupakan tanggung jawab semua elemen masyarakat, baik itu NGO, pemerintah ataupun stakeholder lainnya yang terlibat dalam pembangunan Aceh yang lebih baik.

3.6. Rekomendasi

Secara keseluruhan dari hasil workshop, telah terlihat bahwa keterlibatan dan dukungan pemerintah daerah belumlah optimal dalam pembangunan Aceh paska konflik dan paska tsunami. Begitu juga dengan peran NGO dan donor internasional, masih terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaan program. Sebenarnya, workshop juga telah menunjukkan bahwa kurang optimalnya tingkat keberhasilan dari kegiatan pemerintah daerah, NGO dan donor internasional bukanlah semata-mata kesalahan dari mereka, tetapi juga ada beberapa kesalahan yang ditimbulkan oleh masyarakat itu sendiri.

Dari hasil workshop ini, setidaknya kita mengetahui bahwa semua elemen yang terlibat haruslah benar-benar aktif dan saling mendukung satu sama lain, baik itu lembaga pemberi bantuan maupun penerima manfaat itu sendiri.

Acheh Society Development (ASD) sebagai fasilitator yang telah melahirkan pemikiran-pemikiran positif diatas, haruslah segera mewujudkan beberapa program (pilot project) yang bisa menampung ide-ide dan menekan permasalahan-permasalahan diatas. Setiap program yang akan dijalankan harus melalui pendekatan sosial, budaya, ekonomi, potensi dan kebijakan pemerintah. Program yang berdasarkan desentralisasi, transparansi dan partisipasi akan lebih terjamin dalam hal keberlanjutannya.